

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia tergolong sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Dengan adanya perkembangan zaman, tingkat kepadatan jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah, dengan adanya perkembangan tersebut menyebabkan adanya tingkat kenaikan konsumsi yang dilakukan oleh penduduk Indonesia terhadap sesuatu hal termasuk dalam mengonsumsi segala sesuatu yang nantinya dapat menjadikan limbah sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan pada pasal 1 huruf 1 yang berbunyi : “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Sampah terdiri dari sampah rumah tangga serta sampah sejenis sampah rumah tangga. Selain itu, terdapat sampah spesifik, sampah spesifik merupakan sampah yang terbentuk karena sifat, konsentrasi, atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Dengan begitu, karena adanya sampah maka dilakukan adanya pengelolaan sampah. Dimana penjelasan pengelolaan sampah yaitu merupakan kegiatan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, kegiatan tersebut meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang dilandasi dengan adanya norma. Di Indonesia pengaturan tentang pengelolaan

sampah berada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah diatur dalam Bab VI pada pasal 19 sampai dengan pasal 23.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan pada pasal 5 yang berbunyi : “Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah menjadi salah tugas pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah menjadi salah satu tiang untuk dapat terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik serta memiliki wawasan terhadap lingkungan, sehingga tidak menimbulkan adanya kerusakan lingkungan akibat sampah. Selain itu, norma hukum yang mengatur juga menjadi salah satu tiang lainnya untuk dapat melakukan pengelolaan sampah yang baik serta memiliki wawasan terhadap lingkungan,. Dikarenakan adanya norma hukum, disitu juga terdapat sanksi apabila dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam perkembangannya, eksistensi hukum hanya terbatas dalam hal mengatur hubungan manusia dengan manusia. Prinsip-prinsip hukum lebih ditujukan kepada manusia dengan segala perilakunya dan dalam interaksinya dengan sesama. Hal ini dikarenakan obyek hukum bersifat terbatas kepada manusia dan belum menguasai hubungan antara manusia dengan lingkungannya, maka manusia bisa berkuasa sepenuhnya dengan

alam lingkungannya dengan cara bagaimana saja dan tiada yang melarang dan mengendalikannya, kecuali sudah bertemu dengan kepentingan sesama (manusia).<sup>1</sup>

Masalah-masalah yang timbul akibat sampah dikarenakan ulah manusia yang tidak disiplin dan masih berparadigma yang konvensional bahwa alam dapat menampung sampah dan dapat diuraikan secara alami. Namun dapat kita ketahui bahwa jenis, jumlah sampah meningkat dan daya tampung alam untuk menguraikan sampah tersebut telah terlampaui. Maka perlu merubah paradigma yang sudah tertanam dengan mengenal pengelolaan sampah secara baik dan efektif, terutama pada anak-anak usia dini dan kelak setelah dewasa dapat paham akan pentingnya pengelolaan sampah secara baik dan efektif.<sup>2</sup>

Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pentingnya pemanfaatan sampah perlu untuk ditingkatkan. Barang-barang yang sudah rusak, tidak terpakai, kemasan produk dan sisa makanan hanya dibuang begitu saja, sebagian menumpuk di tempat pembuangan akhir atau berserakan di jalan atau berada di sungai. Banyak yang sudah menganggap aman apabila ada petugas yang sudah mengangkut sampah, sehingga sudah tidak khawatir, padahal belum tentu sampah tersebut dapat mudah diuraikan dan diproses dalam pengelolaannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mukhlis, 2019, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, hal. 8

<sup>2</sup> Masnelyarti Hilman, 2005, *Pendidikan Lingkungan Bagi Pendidik Usia Dini : Pengelolaan Sampah*, Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup, hal. 2

<sup>3</sup> Eka Utami, 2013, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*, Jakarta : Yayasan Uniliver Indonesia, hal. 2

Hubungan manusia dengan lingkungan yang saat ini terjadi yaitu selalu berkaitan dengan timbulnya kerusakan lingkungan, namun disamping itu, adanya prinsip dimana dapat dilakukan pencegahan terhadap adanya kerusakan lingkungan. Prinsip tersebut dinamakan prinsip *Good Environmental Governance*. Dimana prinsip tersebut ditekankan untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya prinsip tersebut menimbulkan suatu tindakan baik dari pemerintah dan juga masyarakat untuk bersama-sama melakukan perlindungan terhadap lingkungan, salah satunya dengan menjaga keindahan lingkungan dari pencemaran sampah.

Agama Islam mengajarkan tentang menjaga suatu kebersihan. Dimana, menjaga kebersihan merupakan sebagian dari keimanan. Bahwa umat Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kebersihan. Diriwayatkan dalam Hadits Riwayat Muslim : Gambar 1. H.R Muslim

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطُّهُورُ شَطْرُ  
الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ أَوْ  
تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ  
وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ (رواه مسلم)

Artinya : “Diriwayatkan dari Abi Malik al-Asy’ari dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kebersihan adalah sebagian dari iman dan bacaan hamdallah dapat memenuhi mizan (timbangan), dan bacaan subhanallahi walhamdulillah memenuhi kolong langit, bumi, dan shalat adalah cahaya

dan shadaqah adalah pelita, dan sabar adalah sinar, dan Al-Qur'an adalah pedoman bagimu.” (H.R Muslim).<sup>4</sup>

Hadits lain yang menjelaskan kebersihan sebagian dari iman yaitu berbunyi “ *Ath-thahuuru syatrul iimaan*” (H.R Ahmad Muslim dan Tirmidzi). Hadits diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai hambanya yang bersih, suci, serta indah. Dengan kata lain, kotor, jorok, dan sampah yang berserakan, lingkungan yang tidak indah tidak di sukai Allah SWT.<sup>5</sup>

Penanganan khusus diperlukan dari pemerintah maupun masyarakat dalam permasalahan sampah saat ini. Dampak negatif dikhawatirkan akan terjadi apabila metode dan teknik pengelolaan sampah tidak berwawasan lingkungan, seperti contohnya penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak bagi kesehatan masyarakat. Pengelolaan secara terpadu dan komprehensif perlu dilakukan mulai dari pengumpulan sampai pada pemrosesan sampah. Apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat maka pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien. Kerusakan lingkungan merupakan pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan dan pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Rahmat AW, “Implementasi Konsep Kebersihan Sebagian dari Iman di IAIN Raden Fatah Palembang”, *Jurnal Tadrib*, Volume 1 Nomor 1 (Juni, 2015) , hal. 172

<sup>5</sup> Ibid, hal. 173

<sup>6</sup> Koesnandi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hal 4

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten beserta masyarakatnya juga harus melakukan kerjasama yang baik agar pengelolaan sampahnya dapat berjalan efektif dan efisien, dikarenakan Kabupaten Klaten menjadi salah satu kabupaten yang tidak bisa lepas dari adanya perkembangan sampah yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan benar.

Sampah masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Klaten. Dikarenakan banyaknya tumpukan sampah. Bahwa Pemkab Klaten telah membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Troketon, Kecamatan Pedan. Berdasarkan pernyataan dari Mudzakir selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan (KP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR), bahwa untuk masalah sampah dapat ditangani di wilayahnya masing-masing, setidaknya dilakukan sosialisasi rutin terkait penanganan sampah kepada warga oleh pemerintah desa. Diketahui bahwa warga sering menjadikan sungai, pinggir jalan, lahan kosong diluar TPS pasar dan lainnya sebagai lokasi pembuangan sampah. Sampah tersebut sudah terbungkus, sehingga tidak dapat diketahui warga sekitar desa atau warga diluar desa tersebut, yang membuang sampah.<sup>7</sup>

Sampah yang di produksi di Kabupaten Klaten mencapai sekitar 160 ton per hari. Bahwa diestimasikan 3 ons sampah dihasilkan oleh satu orang, dari 1,3 juta total penduduk di Kabupaten Klaten. Pernyataan dari Kepala DLHK Srihadi yang didampingi Dwi Maryono, Kabid

---

<sup>7</sup> Koranbernas.id Senin, 9 Desember 2019: Sampah Masih Jadi Masalah Serius di Klaten, dalam <https://koranbernas.id/berita/detail/sampah-masih-jadi-masalah-serius-di-klaten>, diunduh Selasa, 15 September 2020

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Selasa (14/07/2020) bahwa, permasalahan sampah bukan persoalan ringan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk maka persoalan sampah semakin bertambah berat dan kompleks, apalagi menyangkut perilaku publik.<sup>8</sup>

Pengaturan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampahnya terdapat dalam pasal 19 sampai dengan pasal 61. Bahwa disebutkan dalam Pasal 3 berisi terkait tujuan dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Klaten juga membuat kebijakan terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah terutama pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Dilihat dari permasalahan yang timbul akibat sampah di Kabupaten Klaten, serta dilihat dari adanya pengaturan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Sehingga dalam pengelolaan sampah yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Kabupaten Klaten apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

---

<sup>8</sup> Krjogya.com, 14 Juli 2020 : Produksi Sampah di Klaten Capai 160 ton per hari, dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/klaten/produksi-sampah-di-klaten-capai-160-ton-per-hari/>, diunduh Selasa, 15 September 2020

Peninjauan dengan hukum positif tersebut selanjutnya disesuaikan dengan adanya Prinsip *Good Enviromental Governance*. Prinsip tersebut merupakan prinsip dasar terkait perlindungan lingkungan agar didapatkan lingkungan yang sehat serta terlindungi dari segala macam pencemaran.

Berdasarkan uraian diatas, sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian penelitian tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dianalisis dengan hukum positif, selanjutnya disesuaikan dengan adanya prinsip *Good Enviromental Governance*. Sehingga penulis mengambil judul “*KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KABUPATEN KLATEN*”

#### B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana Konsep Pengelolaan Sampah di Kabupaten dalam Prinsip *Good Enviromental Governance* ?

#### C. Tinjauan Pustaka

Sampah merupakan sisa atau residu dapat juga disebut sebagai buangan dari materi, bahan ataupun segala sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, konsep sampah dalam perundang-undangan bahwa akibat proses alam yang berbentuk padat dapat menimbulkan serta memunculkan sampah.

Menurut Rudi Hartono bahwa sampah tidak muncul akibat proses alam, dikarenakan materi-materinya merupakan produk-produk yang tidak



bergerak sehingga tidak dapat disebut sebagai sampah.<sup>9</sup> Menurut Kuncoro bahwa sampah (*waste*) merupakan bahan yang dibuang atau terbuang; karena unsur atau fungsi utama dari aktivitas manusia atau alam yang dihasilkannya sudah diambil sehingga tidak digunakan lagi. Sehingga selama aktivitas manusia masih ada maka timbunan sampah akan tetap ada.<sup>10</sup>

Pengelolaan sampah yaitu merupakan kegiatan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, kegiatan tersebut meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Penanganan sampah yang tidak akurat dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti contohnya dapat menimbulkan banjir apabila sampah dibuang ke saluran air sehingga dapat menyumbat saluran tersebut, polusi udara.

Menurut Enri Damanhuri, bahwa peningkatan jumlah timbunan sampah disebabkan adanya pertambahan penduduk yang semakin pesat terutama didaerah perkotaan. Bahwa masalah pokok pengelolaan sampah kota, yaitu :<sup>11</sup>

1. Pertambahan penduduk di kota
2. Peningkatan kepadatan penduduk
3. Tingkat sosial budaya penduduk kota yang heterogen

---

<sup>9</sup> Rudi Hartono, 2008, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Bogor : Penebar Swadaya, hal. 5

<sup>10</sup> Kuncoro Sejari, 2009, *Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*, Yogyakarta : Kanisius, hal. 12

<sup>11</sup> Yulia Hendra, "Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan : Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah", *Jurnal Aspirasi*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2016), hal. 79

4. Pemerintah daerah yang relatif rendah dalam pendanaan dan prioritas penanganan sampah.
5. Teknik penanganan makanan mengalami pergeseran. Contohnya penggunaan plastik dalam pengemasan yang tidak dapat terurai.
6. Dalam penanganan sampah masih terbatasnya sumber daya manusia yang sesuai di daerah-daerah.
7. Lambatnya pergerakan pengembangan perancangan peralatan persampahan.
8. Kurangnya pengarahan serta pengornasisasian partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah
9. Adanya ketidakcocokan konsep pengelolaan sampah yang diterapkan, dan modifikasi konsep yang kurang terbuka di lapangan.

Indonesia mengenal 2 model pengelolaan sampah yaitu urugan dan tumpukan. Pada umumnya, daerah yang tidak menghasilkan volume sampah besar menggunakan model urugan. Maksud dari model urugan adalah dibuatnya lembah atau cekukan untuk membuang sampah, sehingga sampah hanya sekedar dibuang lalu ditinggalkan dan tidak ada perlakuan lebih lanjut.<sup>12</sup>

Pengurangan sampah selain dilakukan dengan 3R, dapat menggunakan prinsip 4R. Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan

---

<sup>12</sup> H.R. Sudrajat, Op.Cit, hal 10

adanya Prinsip 4R dalam melakukan pengelolaan sampah. Prinsip 4R yang dimaksud antara lain :<sup>13</sup>

1. Reduce ( Menghemat Pemakaian)
2. Reuse (Pemakaian Kembali).
3. Recycle (Mendaur Ulang)
4. Replant ( Menanam Kembali)

#### D. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Adapun tujuan daripada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten sudah sesuai atau tidak dengan peraturan.
- b. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten.

Adapun manfaat daripada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut :

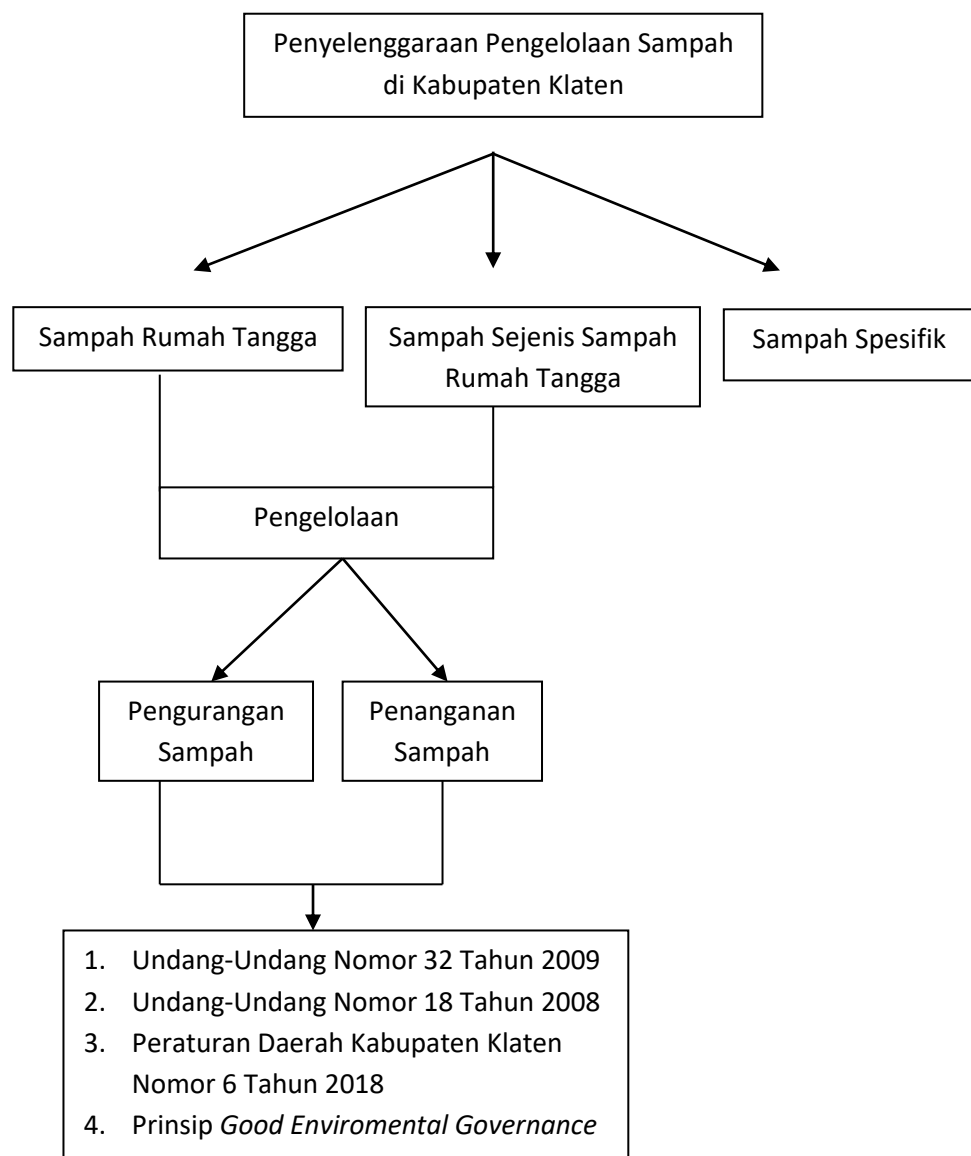
- a. Manfaat Teoritis
  1. Untuk menambah pengetahuan penulis terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah
  2. Untuk menambah wawasan penulis dalam menganalisis terkait kesesuaian penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten
- b. Manfaat Praktis

---

<sup>13</sup>Nursiwan Taqim, 2007, Buku Panduan Mengelola Sampah Rumah Tangga Dengan Prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replant), Pekanbaru : Kementrian Lingkungan Hidup RI, hal 5-20

1. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada program pendidikan Strata 1 (S1), jurusan Hukum Fakultas Hukum, di Universitas Muhammdiyah Surakarta.
2. Memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah.

#### E. Kerangka Pemikiran



Gambar. 2 Bagan Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran ini, diawali dengan adanya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Klaten terkait dengan sampah. Dimana sampah yang dihasilkan penduduk di Kabupaten Klaten tergolong banyak. Dengan begitu memunculkan suatu proses pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Klaten.

Pokok pemikiran dalam penelitian ini yaitu terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam undang-undang dibagi dalam 3 jenis yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik., dimana penyelenggaraan pengelolaan sampah yang menjadi pokok pemikiran dalam penelitian ini yaitu pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Penyelenggaraan pengelolaan keduanya dibagi menjadi 2 yaitu dengan cara pengurangan sampah serta dengan penanganan sampah. Dari kedua cara tersebut dijelaskan di dalam peraturan pengelolaan sampah. Pengaturan tersebut antara lain terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Serta terdapat peraturan yang memperkuat terkait adanya pengelolaan sampah sebagai wujud perlindungan lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan 2 cara pengelolaan sampah yang dijelaskan dalam peraturan tersebut, akan dilakukan analisis penerapan prinsip *Good Environmental Governance* pada pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Prinsip *Good Environmental Governance* merupakan prinsip yang

digunakan untuk melakukan perlindungan lingkungan agar terhindar dari pencemaran lingkungan. Dari pokok pembahasan terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten dilakukan peninjauan serta analisis terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada serta disesuaikan dengan prinsip *Good Environmental Governance*. Sehingga nantinya akan diketahui bagaimana proses penyelenggaraan pengelolaan sampah serta kesesuaiannya dengan peraturan dan prinsip *Good Environmental Governance*.

#### F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, dalam melakukan penelitian seyognyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.<sup>14</sup>

Penelitian yang mempunyai obyek hukum disebut Penelitian Hukum. Penelitian yang dimaksud bahwa hukum sebagai aturan-aturan sebagai suatu ilmu yang sifatnya dogmatis ataupun hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat atau perilaku masyarakat.<sup>15</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang

---

<sup>14</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3

<sup>15</sup> Jonaedy Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, hal. 16

bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan mengalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang yang bersangkutan.<sup>16</sup> Metode penelitian tersebut dijelaskan lebih rinci dengan penjelasan berikut ini :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengertian dari penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari proses penelitian berupa kata-kata dan gambar. Data yang nantinya akan menjadi kunci dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>17</sup>

Penggunaan jenis penelitian ini untuk menganalisa penerapan peraturan terkait pengelolaan sampah yang sudah ada, apakah dijalankan sesuai dengan substansinya. Peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang terkait pengelolaan sampah dan Peraturan Daerah yang mengatur terkait pengelolaan sampah, sehingga analisa tersebut berpacu pada peraturan yang ditentukan untuk daerah yang akan dilakukan penelitian sudah menerapkan peraturan yang ditetapkan atau belum.

### 2. Metode Pendekatan

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Gravika, hal 18

<sup>17</sup> Moleong, Lexy J, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, hal 36

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis empiris yang mana penelitian akan dilakukan dengan cara menelaah secara lebih dalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif. Artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).<sup>18</sup> Bahwa dalam penelitian ini akan dijelaskan konsep pemberlakuan hukum dalam masyarakat, sehingga dapat ditemukan bahwa bagaimana hukum tersebut dijalankan oleh masyarakat, dengan begitu dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan beberapa responden yang memiliki pengetahuan terkait obyek dalam penelitian ini.

Penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu hukum ditinjau pada dirinya sendiri dari unsure-unsur diluar dirinya (hukum). Bahwa fenomena-fenomena sosial yang berada di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum secara individual maupun institusional pada masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis. Hukum diartikan dalam kenyataan (*Sen*).<sup>19</sup>

Observasi dan eksperimen sangat diandalkan dalam ilmu-ilmu empiris untuk membuktikan kebenaran. Untuk membuktikan hipotesis

---

<sup>18</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal 24

<sup>19</sup> Hardianto Djanggih, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makasar : CV. Social Politic Genius (SIGn), hal. 5



maka dilakukan cara yaitu observasi dan eksperimen. Bukti yang didapatkan dengan cara observasi dan eksperimen disebut empiris, yaitu bukti yang dapat di indera. Ilmu-ilmu alamiah serta ilmu-ilmu sosial merupakan wujud dari ilmu-ilmu empiris.<sup>20</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten, dimana diperoleh data terkait penelitian ini di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>21</sup> Data yang diperoleh atau diambil secara langsung melalui sumber informasi yang memahami terkait substansi dari penelitian ini, dilakukan dengan wawancara atau melalui observasi lapangan yang kemudian dilakukan pengelolaan data oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah yang berada di dinas-dinas yang terkait.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>20</sup> Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hal. 23

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, Op.Cit hal. 106

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan :

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum yang mengikat dimana bahan hukum tersebut terdiri dari norma-norma, yang kaitannya dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal, hasil penelitian/publikasi orang lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan peneliti yaitu :

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Data-data yang termasuk yaitu merupakan data kepustakaan yang memiliki sumber antara lain dari peraturan perundang-

---

<sup>22</sup> Ibid.

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b. Metode Penelitian Lapangan

Data-data yang merupakan data penunjang yang diperoleh melalui informasi atau pendapat dari responden dengan melakukan wawancara terkait obyek yang dilakukan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan menganalisis data yang berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018, lainnya yang selanjutnya peraturan tersebut akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis baik dari studi lapangan (wawancara dan observasi) dan studi kepustakaan, selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. Jadwal Waktu Pelaksanaan

Tabel 1. Jadwal Waktu Pelaksanaan

Unsur Pelaksana/Waktu	Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV
Penyusunan Praproposal	V			
Penyusunan Proposal	V			
Seminar Proposal		V		
Pengumpulan Data			V	
Analisis Data			V	
Penyusunan Laporan				V

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum maka penelitian menyiapkan suatu sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

Sistematika penulisan tersebut merupakan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN :**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan dan perumusan Masalah
- C. Tinjauan Pustaka
- D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Berfikir
- F. Metode Penelitian
- G. Jadwal Waktu Pelaksanaan
- H. Sistematika Penulisan Penelitian

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang terkait perihal penelitian ini yaitu penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Kebijakan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten.
- B. Prinsip Good Environmental Governance dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**